



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 02 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 tahun 2018 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.3.847.375.682.921,00 bertambah sebesar Rp.314.196.410.714,00 sehingga menjadi Rp.4.161.572.093.635,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp.3.812.375.682.921,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 118.807.082.675,-
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.3.931.182.765.596,-
2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp.3.493.333.057.229,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 314.196.410.714,-
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.3.807.529.467.943,-
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1). Semula Rp. 35.000.000.000,-
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp.195.389.328.039,-
 - Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp.230.389.328.039,-

b. Pengeluaran pembiayaan

1). Semula	Rp.354.042.625.692,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.0,-
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.354.042.625.692,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	(Rp.123.653.297.653,-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.0,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1). Semula	Rp.1.537.064.614.921,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. 87.932.082.675,-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.1.624.996.697.596,-

b. Pendapatan transfer

1). Semula	Rp.2.273.929.114.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. 30.000.000.000,-
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.2.303.929.114.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1). Semula	Rp.1.381.954.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. 875.000.000,-
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.2.256.954.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.1.194.666.513.991,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 66.894.604.508,-
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.1.261.561.118.499,-

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.255.811.794.389,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.193.660.844,-
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.257.005.455.233,-

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- 1) Semula Rp.50.838.250.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.19.979.461.445,-
- Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp.70.817.711.445,-
yang di pisahkan setelah perubahan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula Rp.35.748.056.541,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 135.644.122,-)
- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.35.612.412.419,-
sah setelah perubahan
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- 1). Semula Rp.2.273.929.114.000,-
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 30.000.000.000,-
- Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.2.303.929.114.000,-
- b. Transfer antar daerah
- 1) Semula Rp.0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,-
- Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan Rp.0,-
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula Rp.1.381.954.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 875.000.000,-
- Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp.2.256.954.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- 1) Semula Rp.2.501.102.507.678,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 118.177.920.600,-
- Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp.2.619.280.428.278,-
- b. Belanja modal;
- 1) Semula Rp.392.798.840.328,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 65.169.353.905,-
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.457.968.194.233,-

c. Belanja tidak terduga;

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.9.508.656.098,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp.1.500.000.000,-) |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.8.008.656.098,-

d. Belanja transfer;

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.589.923.053.125,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.132.349.136.209,- |

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.722.272.189.334,-

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf terdiri atas ;

a. Belanja pegawai

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.340.581.220.325,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 54.416.601.713,- |

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.1.394.997.822.038,-

b. Belanja barang dan jasa

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.931.515.134.723,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 35.363.552.566,- |

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.966.878.687.289,-

c. Belanja bunga

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp.44.051.278.562,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,- |

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.44.051.278.562,-

d. Belanja subsidi

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp.3.700.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.7.500.000.000,- |

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.11.200.000.000,-

e. Belanja hibah

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.179.754.874.068,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 21.339.234.239,- |

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.201.094.108.307,-

f. Belanja bantuan sosial

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp.1.500.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp. 441.467.918,-) |

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp.1.058.532.082,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp.40.336.176.576,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 3.000.000.000,-)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 37.336.176.576,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp.163.121.457.341,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.104.054.414,-

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin
setelah perubahan Rp.171.225.511.755,-

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp.107.565.358.030,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.905.716.640,-

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan
setelah perubahan Rp.131.471.074.670,-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp.63.901.018.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp.35.940.504.708,-

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan
irigasi setelah perubahan Rp.99.841.522.708,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp.17.874.830.381,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 219.078.143,-

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah
perubahan Rp.18.093.908.524,-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula Rp. 9.508.656.098,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp.1.500.000.000,-)

Jumlah belanja modal aset tidak berwujud
setelah perubahan Rp.8.008.656.098,-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp.589.923.053.125,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp.127.349.136.209,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp.717.272.189.334,-

b. Belanja bantuan keuangan

- 1) Semula Rp.0,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.5.000.000.000,-

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah
perubahan

Rp.5.000.000.000,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) Semula Rp. 35.000.000.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.195.389.328.039,-

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah
perubahan

Rp. 230.389.328.039,-

b. Pengeluaran pembiayaan.

- 1) Semula Rp.354.042.625.692,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan

Rp. 354.042.625.692,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- 1) Semula Rp. 35.000.000.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 195.389.328.039,-

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah perubahan

Rp. 230.389.328.039,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

- 1) Semula Rp.62.000.000.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,-

Jumlah Penyertaan modal daerah setelah
perubahan

Rp.62.000.000.000

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

- 1) Semula Rp.292.042.625.692,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,-

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo setelah perubahan

Rp.292.042.625.692,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
 Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal;
12. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-Lain
13. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
14. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan.
15. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

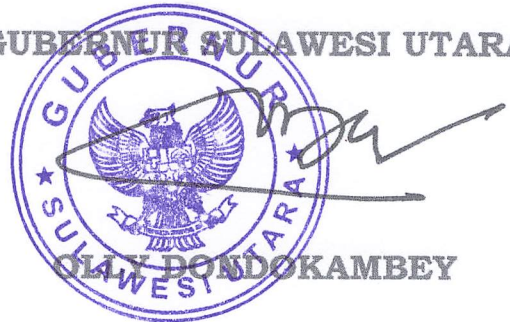
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.

Pada tanggal 13 Oktober 2023

GUBERNUR SULAWESI UTARA



Diundangkan di Manado.

Pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2-194/2023